

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan dari teori Ansell dan Gash, *collaborative governance* dapat dilihat dari empat sektor yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Dari keempat indikator tersebut, *collaborative governance* pengelolaan sampah laut daerah pantai kota Padang pada tahun 2022-2024 masih berada di tahapan yang sangat awal dan belum berada di kolaborasi yang mapan. Seluruh pihak dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat melaksanakan peran mereka, namun permasalahan dalam koordinasi, kelembagaan, dan kepemimpinan menjadi hambatan terbesar kolaborasi ini dapat terlaksana dengan baik.

Kolaborasi didasari oleh kesadaran bahwa permasalahan sampah laut merupakan isu yang tidak bisa dihiraukan begitu saja. Setiap pihak setuju bahwa perlu penanganan serius terhadap masalah tersebut dan mengakui bahwa tidak akan bisa diselesaikan oleh satu instansi sendiri. Dinas lingkungan hidup mengharapkan adanya kerja sama dalam pengelolaan sampah dan sampah laut agar kota Padang menjadi lebih bersih dan lepas dari permasalahan sampah tersebut. Namun, harapan ini tidak sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah melalui dinas. Permasalahan nyata yang sudah di akui secara bersama tidak di lembagakan dalam suatu perjanjian dan aturan, dan juga tidak dijadikan sebuah dokumen tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga setiap pihak baik perusahaan dan masyarakat yang ikut

terlibat dalam kerja sama melalui undangan dari pihak dinas menjadi kebingungan dalam melaksanakan kolaborasinya.

Selain itu, tidak adanya sosok atau figur yang mengontrol progres yang ada menyebabkan rendahnya kepemimpinan dalam kolaborasi. Permasalahan ini menyebabkan progres yang tidak di tindak lanjuti dengan baik, tanggung jawab yang tidak dilaksanakan, dan tujuan bersama yang belum dapat dicapai. Ketiga isu di atas menyebabkan kolaborasi yang ada menjadi susah untuk dilaksanakan oleh seluruh sub sektor penunjang yang ada.

6.2 Saran

1. Secara teoritis, peneliti menyarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penerapan teori *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah laut daerah pantai kota Padang. Peneliti menyarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait bentuk kepemimpinan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kota Padang sesuai dengan pandangan Ansell dan Gash. Bagaimana peran seorang kepala dinas dalam mengatur instansi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Secara praktis, saran peneliti kepada pemerintah adalah untuk memperbaiki kolaborasi yang ada dengan melembagakan kerja samanya dengan baik. Meningkatkan komunikasi yang lebih fasilitatif dan menerima segala masukan yang diberikan pihak yang terlibat agar menjadi masukan yang membangun. Dinas lingkungan hidup juga diharapkan untuk tidak lagi fokus dengan tugas dasar dalam pengelolaan sampah, namun juga harus

menjadi aktor terdepan dalam mendorong transformasi sikap dan gaya hidup masyarakat dalam mereduksi jumlah sampah.

